

**GORO-GORO  
MENJERAT  
GUS DUR**

**Marah, Sedih, Tawa, Rindu**

# GORO-GORO MENJERAT GUS DUR

**Marah, Sedih, Tawa, Rindu**

Ahmad Hakim Jayli | Ahmad Zainul Hamdi | Aksin Wijaya |  
Anis Hidayatie | Fahrul Muzaqqi | Fawaizul Umam | Ferhadz A.  
Muhammad | Hufron | Listiyono Santoso | M. Faizi |  
M. Mas'ud Said | M. Said Hudaini | Marzuki Wahid | Moh. Syaeful  
Bahar | R.N. Bayu Aji | Rijal Mumazziq Z | Tohadi

**Editor: Ahmad Zainul Hamdi**



**2020**

**Goro-Goro Menjerat Gus Dur**  
**Marah, Sedih, Tawa, Rindu**  
©2020

**Penulis:** Ahmad Hakim Jayli, Ahmad Zainul Hamdi, Aksin Wijaya,  
Anis Hidayatie, Fahrul Muzaqqi, Fawaizul Umam, Ferhadz A.  
Muhammad, Hufron, Listiyono Santoso, M. Faizi, M. Mas'ud Said,  
M. Said Hudaini, Marzuki Wahid, Moh. Syaeful Bahar, R.N. Bayu  
Aji, Rijal Mumazziq Z, Tohadi  
**Editor:** Ahmad Zainul Hamdi  
**Perancang Sampul dan Isi:** M Rizal Abdi

203 hlm + xvi, 14,5 cm x 21 cm

Cetakan Pertama, September 2020  
ISBN 978-623-7177-53-1

**Penerbit Gading**

Jl. Pura No 203 Sorowajan Baru Yogyakarta

## Daftar Isi

**Pengantar Penerbit — v**

**Kata Pengantar — vii**

Gus Dur: Inspirasi yang Menyatukan dan Menggerakkan,  
*Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM. (Ketua PW ISNU Jawa Timur)*

**Prolog**

Kemarahan Terindah

*Ahmad Zainul Hamdi — 1*

**BAGIAN SATU: MARAH**

Pemakzulan Gus Dur: Perspektif Politis dan Yuridis

*Tohadi — 17*

Pemakzulan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid:

Kecelakaan Politik Ketatanegaraan

*Hufron — 50*

Risiko Presiden Antikompromi

*Marzuki Wahid — 59*

Gus Dur dan Kebenaran yang Tertunda: Kesaksian Korlap  
Aksi Melawan Penjatuhan Presiden Gus Dur

*Moh. Syaeful Bahar — 76*

Mihnah Gus Dur: Menjerat Para Politisi dan Intelektual  
Pengkhiran Reformasi

*Aksin Wijaya — 85*

Gus Dur, Megawati, dan Jeratan Oligarki

*Ahmad Zainul Hamdi — 99*

#### **BAGIAN DUA: SEDIH**

Luka ini Bukan karena Dikalahkan, tapi karena Dikhianati

*Fawaizul Umam — 105*

Sang Pembela yang Tak Dibela

*M. Said Hudaini — 118*

#### **BAGIAN TIGA: TAWA**

Kisah sebuah Joke di Istana Negara Menjelang Pelengseran  
Gus Dur

*Moh. Syaeful Bahar — 127*

Presiden Oleng

*M. Faizi — 133*

Terhadap Para Pembencinya, Gus Dur Bilang: “Gitu Saja  
Kok Repot!”

*Rijal Mumazziq Z. — 141*

Gus Dur yang Memang *Woles*

*R.N. Bayu Aji — 149*

**BAGIAN EMPAT: RINDU**

Merindukan Gus Dur, Manusia Mulia Potret Muslim

Ramah Tanpa Amarah

*Anis Hidayatie — 157*

*Becik Ketitik, Olo Ketoro: Menafsiri (Presiden) Gus Dur*

*Listiyono Santoso — 161*

Bukan tetang Jabatan, Politik adalah tentang

Kemanusiaan

*Ferhadz A. Muhammad — 173*

Gus Dur Teladan Politik Nir-Ego

*Fahrul Muzaqqi — 179*

Gus Dur, *Sheriff* dan *High Noon in Jakarta*

*Ahmad Hakim Jayli — 183*

Kronologi Pemakzulan Presiden Gus Dur — 188

Biografi Kontributor —196

# Gus Dur, Megawati, dan Jeratan Oligarki <sup>1</sup>

*Ahmad Zainul Hamdi*

LIMA tahun sebelum Reformasi 1998, tepatnya 10 Desember 1993, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerbitkan artikelnya yang berjudul “Megawati dan KLB PDI”. Artikel yang terbit empat hari setelah Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (kini PDI-P), Surabaya 2-6 Desember 1993, yang berakhir kisruh itu jelas sekali berisi dukungan Gus Dur terhadap Megawati.

Artikel ini menunjukkan sikap resmi Gus Dur terhadap perlawanan Megawati bersama kelompoknya di PDI terhadap otoritarianisme rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Perlu diketahui bahwa dekade 80-an hingga 90-an awal merupakan puncak kekuasaan Orde Baru. Nyaris tidak ada tokoh dan kekuatan rakyat yang berani menantang rezim.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini sudah pernah diterbitkan *NU Online* dengan judul sama, 9 Januari 2020.

Awal 90-an, Gus Dur justru meletakkan dirinya sebagai pengkritik rezim yang paling keras. Ia muncul sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap pemerintah. Ketika nyaris semua intelektual Muslim berhasil dirangkul pemerintah melalui wadah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gus Dur bergeming, justru semakin memperkeras kritikan-kritikannya.

Seperti sengaja menantang, setahun setelah pendirian ICMI, tepatnya tahun 1991, Gus Dur mendirikan dan memimpin Forum Demokrasi (Fordem) yang bisa dianggap sebagai embrio kekuatan *civil society* di Indonesia. Di dalamnya, berkumpul para aktivis dan intelektual yang selama ini dikenal sangat kritis kepada rezim. Dari sini, dimulailah kisah pencekalan Gus Dur di mana-mana. Sebagai *icon* kekuatan oposisi, forum-forumnya selalu dipenuhi oleh pengunjung yang hadir dengan antusiasme sekaligus perasaan takut.

Dalam konteks inilah, dukungan Gus Dur terhadap Megawati harus didudukkan. Artikulasi politik keluarga Soekarno yang telah lama direpresi oleh rezim Orde Baru pada akhirnya muncul melalui sosok Megawati. Ketika dalam sebuah KLB yang kisruh dan penuh kekerasan, Megawati yang dikehendaki mayoritas peserta kongres hendak dijegal pemerintah melalui intervensi yang brutal, Gus Dur menunjukkan sikapnya melalui artikel itu.

Ketika pemerintah tampak mau menerima keterpilihan Megawati sebagai Ketua Umum PDI tapi dengan memasang “orang-orang pemerintah” di sekitarnya, Gus Dur menulis: “Dari sudut pandangan pihak pemerintah ini secara objektif haruslah dikembangkan sikap untuk mengakomodasikan kenyataan faktual akan dukungan besar warga masyarakat ke-

pada putri Bung Karno itu. Artinya tidak hanya sekedar menerima dia sebagai ketua umum, melainkan memberikan porsi dan tempat yang layak kepada para pendukungnya. Tanpa hal itu, dalam praktek pemerintah telah mengingkari konstitusi PDI dan mencoreng Demokrasi Pancasila sendiri.”

Bahkan, Gus Dur juga secara implisit mendorong Megawati agar tidak tunduk pada skenario “kompromi” yang ditawarkan rezim. Jika Megawati menerimanya, hal itu berarti “memberikan toleransi kepada oportunisme dan praktik-praktik politik kotor untuk tetap berkembang di lingkungan PDI.”

Sejak saat itu, Gus Dur-Megawati tidak hanya menjadi sepasang sahabat, tapi juga ikon gerakan *civil society* Indonesia. Gus Dur bergerak melalui NU dan Fordem-nya, Megawati menggalang perlawanan melalui PDI-nya. Kedekatan dua orang ini tetap terjaga hingga detik-detik akhir kekuasaan rezim Orde Baru yang akhirnya tumbang oleh gelombang Reformasi 1998. Bersama dengan Amien Rais, mereka bisa dikatakan sebagai imam dari gerakan Reformasi saat itu. Sejarah akhirnya mencatat, Gus Dur dan Megawati berpasangan menjadi presiden dan wakil presiden, sedang Amien Rais menjadi ketua MPR.

Sebuah *ending* yang indah bukan? Sayangnya, ini bukan akhir kisahnya. Berkali-kali, Gus Dur menyatakan bahwa dalam politik, tidak ada kawan abadi, karena yang abadi adalah kepentingan. Karena kepentingan itulah pertemanan antara Gus Dur dan Megawati pecah di tengah jalan. Buku *Menjerat Gus Dur* yang ditulis Virdika Rizky Utama telah membuka bagaimana kepentingan oligarki yang diorkrestrasi oleh Fuad Bawazir, Akbar Tanjung, Amien Raies, Arifin Panigoro dan sisa-sisa

kekuatan rezim Orde Baru lain akhirnya berhasil “membujuk” Megawati untuk hadir di MPR guna menjungkalkan sahabat yang telah lama mendukung dan melindunginya.

Huntington dalam *Political Order in Changing Societies* menyatakan, transisi politik pasca-reformasi penuh dengan risiko. Tidak jarang transisi politik pasca-reformasi tidak mengarah pada demokrasi, tapi justru kembalinya otoritarianisme lama dalam bentuk baru. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kekuatan masyarakat tidak terorganisasi secara baik, bahkan tidak jarang antarkelompok dalam masyarakat memiliki isu dan kepentingan politik sendiri-sendiri yang saling bertentangan. *Kedua*, kekuatan rezim lama beserta infrastruktur politik yang menopangnya serta nilai-nilai politik yang menjadi basis ideologisnya masih ada. Kekuatan lama sewaktu-waktu masih bisa mengonsolidasikan kekuatannya kembali dan kemudian membelokkan arah reformasi.

Buku Huntington yang terbit di awal 70-an itu seakan secara khusus ditulis untuk menggambarkan wajah politik Indonesia pasca-Reformasi 1998. Kekuatan reformis menyimpan kepentingan politiknya sendiri-sendiri yang bahkan sama sekali tidak terkait dengan agenda reformasi politik. Sementara kekuatan rezim lama tidak hanya berhasil mengkonsolidasi kekuatannya kembali, tetapi juga bersekutu dengan sebagian kelompok reformis untuk membajak reformasi dengan iming-iming kekuasaan sekalipun hal itu berarti menoleransi oportunisme dan berbagai praktik politik kotor.

Di dalam artikel yang sama, Gus Dur menulis sebuah kalimat yang terasa sangat profetik: “Efektivitas ‘arus bawah’ dalam percaturan politik kita ternyata masih belum dapat menandingi ‘pola pembinaan’ yang diterapkan oleh aparat pemerintah atas gerakan kemasyarakatan.”

## Kontributor

**Ahmad Hakim Jayli**, lahir di Pasuruan, 24 Mei 1972. Alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gadingkasri, Kota Malang, ini sejak mahasiswa telah jatuh cinta pada dunia jurnalistik. Kecintaannya pada dunia pers, membawanya ke Jakarta menempuh pendidikan pascasarjana di bidang Manajemen Komunikasi di FISIP Universitas Indonesia. Di awal Januari 2010, dia mendirikan PASTV yang kemudian berubah menjadi TV9 Nusantara di mana dia menjadi Direktur Utamanya. Selepas menyelesaikan kuliah S1-nya di Universitas Brawijaya Malang, dia dipercaya menjadi sekretaris PCNU Kabupaten Pasuruan selama dua periode (2007-2011). Sebelumnya, saat Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998, dia ditunjuk para kiai NU setempat menjadi Ketua Dewan Tanfidz PAC PKB Kecamatan Rejosjo. Kini, suami yang penuh kesetiaan ini berkhidmah sebagai Wakil Ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU dan Wakil Sekretris PWNU Jawa Timur.

**Ahmad Zainul Hamdi**, atau yang biasa dipanggil **Ahmad Inung** ini, lahir di Lamongan, 18 Mei 1972. Sehari-harinya, ayah dua orang putri (Firsta Regina Citasmara dan Sania Idayu Virginia) ini menjadi Ketua Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UINSA Surabaya. Dia juga mengajar di Pascasarjana Universitas Islam Malang (UNISMA).